

STUDI LITERATUR *ELECTRONIC BUDGETING* SEBAGAI PENINGKATAN TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Tia Mahrurotul Fikriyah^{1*}, Sri Trisnarningsih²

*Email : 21062020007@student.upnjatim.ac.id¹, trisna.ak@upnjatim.ac.id²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur^{1,2}

Abstract This study uses a literature review because the aim is to find out the implementation of e-budgeting in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) plan aimed at transparency in the bureaucracy. The reduced public trust in the government is the basis for the formation of e-government, which is present to implement the principles of good governance. The effectiveness, efficiency, accessibility, accountability, and transparency of the APBD can regain public trust in local governments in Indonesia. This study uses a review of several articles that are relevant to this topic. Database searches using Google Scholar and Mendeley as reference tools with the keywords e-government, good governance, transparency, and e-budgeting. From the search results, 15 articles were obtained as the main references for this research. The results of this study explain that the implementation of e-government in local governments must be balanced with the behavior and capacity of human resources, budgets, and technological developments in the regions. The implementation of e-budgeting in several areas, such as DKI Jakarta, Bandung, Banyuwangi, and Surakarta, has a level of transparency and efficiency in the use of APBD. The people have begun to be interested in participating in overseeing the realization of the APBD for growth and development. This study is expected to be a reference for further researchers to study more deeply the implementation of e-budgeting in various regions in Indonesia. Considering the many regions in Indonesia with diverse cultures, the results of the implementation and acceptance of the e-budgeting system may differ.

Keywords: E-Government, good governance, transparency, E-Budgeting

Abstrak Penelitian ini menggunakan literature review dikarenakan tujuan untuk mengetahui penerapan e-budgeting pada rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditujukan untuk transparansi pada birokrasi. Berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi dasar dari pembentukan e-government yang hadir untuk mengimplementasikan asas-asas dari good governance. Efektifitas, efisiensi, aksesibilitas, akuntabilitas dan transparansi APBD bisa mengambil kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kajian beberapa artikel yang relevan dengan topic ini. Pencarian database menggunakan google scholar dan mendeley sebagai alat referensi dengan kata kunci e-government, good governance, transparansi, dan e-budgeting. Dari hasil pencarian tersebut, diperoleh 15 artikel sebagai rujukan utama penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan e-government pada pemerintah daerah harus didibangi dengan perilaku dan kaspasitas SDM, Anggaran, dan perkembangan teknologi di Daerah. Pada penerapan e-budgeting di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Bandung, Banyuwangi dan Surakarta memiliki tingkat transparansi dan efisiensi pada penggunaan APBD. Masyarakat sudah mulai tertarik untuk ikut mengawasi realisasi APBD untuk pertumbuhan dan pembangunan studi ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam penerapan e-budgeting di berbagai daerah di Indonesia. Mengingat banyaknya daerah di Indonesia dengan beragam budaya yang dimiliki dengan hasil penerapan dan penerimaan sistem e-budgeting yang mungkin berbeda.

Kata kunci: E-Government, good governance, transparansi, E-Budgeting

Pendahuluan

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi alat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini (Setiawan, 2018). Pesatnya perkembangan sistem informasi saat ini memberikan banyak manfaat bagi institusi, baik pemerintahan, pendidikan maupun perbankan (Harsanto, 2020). Teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan pemerintah untuk menyampaikan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintahan menjadi salah satu organisasi pada sektor publik yang berorientasi pada kebutuhan publik, sehingga organisasi sektor publik tidak berfokus pada laba sebagai sasaran di masa mendatang (Bastian, 2019). Di Indonesia, kebutuhan dan juga kepentingan dasar tiap-tiap warga negara perlu dipenuhi sesuai dengan amanat UUD 1945 (Prayoga & Yuhertiana, 2021).

Penerapan sistem informasi di sektor publik (e-government) seperti yang digunakan oleh pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, menyediakan informasi publik yang tepat waktu dan akurat, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam tugas-tugas administrasi (Andriyanto et al., 2019). Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) menjadi hal penting untuk diungkapkan secara transparan. Pengungkapan ini ditujukan untuk mengurangi disfungsi anggaran dan menjadikan masyarakat mengetahui APBD digunakan untuk apa saja (Rachmania, 2020). Menurut (Triani & Handayani, 2018) Penggunaan sistem jaminan informasi dapat memberikan transparansi dalam pengelolaan keuangan suatu negara dan sangat penting bagi masyarakat umum dalam mengelola administrasi keuangan suatu negara. APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) (Efriza & Supena, 2021). (Sinambela et al., 2018) menjelaskan bahwa APBD adalah penjabaran kuantitatif dari tujuan, sasaran pemerintah daerah dan tugas pokok serta fungsi unit kerja, sehingga harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Oleh sebab itu, Penggunaan data yang tepat untuk meningkatkan berbagai program dan inisiatif dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat umum serta layanan yang bermanfaat bagi public (Kusumawati, 2019).

Ketersediaan informasi pada setiap lembaga daerah dan badan public dapat mendorong terciptanya *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) meliputi transparansi, efektif, efisien dan akuntabel (Kusumawati, 2019). *Good governance* diharapkan dapat menjadi solusi untuk reformasi birokrasi dan budaya organisasi pemerintahan yang lebih sehat. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 berada di skor 37, Turun sebanyak tiga poin dari tahun sebelumnya dan Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara yang dilibatkan (CNN Indonesia, 2021). Pemerintah mengeluarkan kebijakan dan regulasi untuk menangani korupsi di Indonesia, terutama pada sektor pemerintahan yang jika terjadi tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian pada Negara. Sehingga, *good governance* dijadikan tolok ukur untuk kinerja pemerintah dalam mengelola APBD maupun APBN. Hubungan antara individu satu dengan individu lainnya penting dalam organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Dalam penyusunan anggaran kerjasama tim dan perilaku antar individu menjadi hal dasar untuk tercapainya tujuan perencanaan anggaran yang transparan (Nuraeni & Suryana, 2020).

Perencanaan anggaran merupakan tahapan yang sangat penting karena anggaran yang tepat sasaran akan berpengaruh pada indeks pembangunan daerah (Wance, 2019). Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memajukan daerah secara bersama-sama. Era revolusi 4.0 dikenal sebagai era digitalisasi yang semua lini kehidupan telah terdampak dari era digital tanpa terkecuali pemerintahan (Khotimah & Astuti, 2020). Sistem e-budgeting menjadi salah satu bentuk transparansi yang dilakukan pemerintah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Hakim et al., 2021). Sistem e-

Budgeting hadir dalam sektor pemerintahan sebagai perwujudan dari adanya transparansi pengelolaan keuangan daerah kepada public (Adila & Dahtiah, 2020). System ini berbasis online yang dapat diakses siapa saja dan kapan saja, baik itu masyarakat umum maupun individu yang mempunyai wewenang. Sistem ini berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan bagi masyarakat umum, baik dalam bentuk pekerjaan atau proses untuk mengurangi kecemasan sektor public (Prayoga & Yuhertiana, 2021). Persepsi individu berperan penting untuk mengimplementasikan inovasi sistem informasi. Jika individu tidak dapat menerima perubahan akan inovasi tersebut, mengakibatkan sistem informasi yang dirancang sedemikian baik tidak bisa berfungsi semestinya jika tidak didukung oleh penerimaan dan penggunaan oleh individu yang bersangkutan.

Penelitian yang dilakukan (Triyono et al., 2019) menunjukkan adanya beberapa program dan kegiatan yang belum konsisten antara perencanaan dan penganggaran dikarenakan hasil dari evaluasi tidak mencapai target yang signifikan sehingga keterbatasan anggaran mengakibatkan program yang direncanakan harus diganti dengan program prioritas serta terjadinya kesalahan penginputan. Hasil penelitian yang dilakukan (Nugraha & Wibowo, 2020) menjelaskan bahwa "E-budgeting berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan". Evaluasi kinerja dari e-budgeting diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh system tersebut mengurangi penyelewengan APBD. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (A'yun & Hartaman, 2021) system e-budgeting yang dilakukan di Kabupaten Maros dilaksanakan dengan baik akan tetapi belum optimal dikarenakan belum mencakup 6 kriteria dalam penilaian yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap dan ketepatan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku transparansi pemerintah daerah dalam mengelola APBD dengan perencanaan *e-budgeting*, dan bagaimana perilaku individu dapat menciptakan *good governance* melalui penerapan *e-government* dengan tinjauan literatur sebagai instrumen penelitian.

Literature Review

Teori Kontijensi

Teori kontijensi menunjukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku organisasi dan menghasilkan beragam perilaku (Luthans & Stewart, 1978). Menurut (Fernández-Robin et al., 2019) teori kontijensi menunjukkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sistem manajemen dan kinerja organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan. Faktor utama adalah lingkungan. Lingkungan sekitar yang dibentuk oleh elemen politik, ekonomi, hukum dan sosial. Teori Kontinjensi menjelaskan bahwa ketergantungan antara satu variabel dengan kondisi objektif mengakibatkan pengambilan kebijakan dan keputusan harus sesuai dengan kondisi tersebut (Kholis et al., 2021). Jika disambungkan dengan *good governance* pada sektor publik, lingkungan dari pemerintah daerah harus mendukung terciptanya inovasi baru dalam perencanaan anggaran (Hanamunika et al., 2021). Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, praktek manajemen pemerintah harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi (Setiawan, 2018). Tidak memungkinkan sistem pemerintahan lama diterapkan pada era digitalisasi seperti sekarang (Andriyani et al., 2021).

E-Budgeting

Penganggaran secara elektronik (E-Budgeting) adalah suatu sistem penganggaran yang berbasis web/aplikasi program untuk memfasilitasi proses penganggaran daerah (Rahman et al., 2019). Sangat penting untuk menerapkan e-budgeting di tingkat lokal untuk meningkatkan transparansi dalam pembangunan ekonomi lokal (Nurwanda & Badriah, 2020). Hal ini karena dapat memberikan informasi yang berguna bagi pejabat pemerintah (eksekutif dan legislatif). Dalam hal pengembangan bisnis yang efektif, semuanya bermuara pada peningkatan transparansi dalam transaksi bisnis di masa depan.

Sistem E-budgeting memberikan peranan yang penting dalam pembuatan anggaran (Mensah, 2019). Sistem tersebut mampu mempersingkat waktu yang diperlukan dalam proses pembuatan anggaran karena dilakukan secara online dan dapat diakses dimana saja, namun efisiensi waktu tersebut dapat dicapai jika penggunaan sistem tersebut dapat dioperasionalkan dengan baik oleh penggunanya (Zahri & Kusumastuti, 2020). Penyusunan anggaran secara elektronik atau e-budgeting sangat berperan penting dalam penyusunan anggaran di sektor publik yang dilakukan oleh departemen pemerintahan, sebagai bentuk wujud nyata pengelolaan keuangan daerah yang transparan kepada masyarakat (Gamayuni & Hendrawaty, 2020).

E-Government

Salah satu jenis *e-government* adalah portal pengaduan online berbasis web. Proses penyelesaian tugas harus diklasifikasikan agar dapat diselesaikan tepat waktu dan akurat (Nugroho et al., 2020). *E-Government* memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana publik, tuntutan terhadap keterbukaan informasi yang menyeluruh, serta layanan publik berbasis internet dalam birokrasi (Habibie, 2019) (Maulana et al., 2020). Menurut (Zaliluddin et al., 2020) "*E-Government* adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudian fasilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat".

Gambar 1. Contoh model *e-government*



Sumber : codinglab.id

Dari gambar 1 dapat dilihat, seluruh pelayanan public mulai diintegrasikan dengan teknologi informasi. Mulai dari keamanan, pengendalian, dan pendidikan dibuat pelayanan terpadu dengan sistem online. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Wahyuningsih & Purnomo, 2020) tentang penerapan e-government di Korea Selatan dan Indonesia yang menghasilkan *e-government* merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah berfungsi sebagai pelayanan kepada masyarakat.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan *literature review*. *Literature review* merupakan proses ilmiah yang menghasilkan output berupa laporan yang dimaksudkan untuk melakukan pembuktian atau pendekatan masalah tertentu (Cahyono et al., 2019). Menurut (Andiola et al., 2019) Tinjauan pustaka adalah jenis esai yang merangkum dan menganalisis penelitian sebelumnya tentang topik tertentu. Dalam

pembuatan sebuah literatur umumnya terdapat 3 proses utama yaitu *planning*, *conducting* dan *reporting* (Zhu et al., 2018) (Santis et al., 2018).

Tahap pertama yaitu *Planning* (Perencanaan). Dalam penyusunan perencanaan sebuah penelitian akan berorientasi pada tujuan akhir (Thenata, 2021). Tujuan pertama pada penelitian ini untuk mengetahui seberapa jauh *e-budgeting* dapat menciptakan transparansi pada penggunaan APBD. Dan tujuan kedua, untuk mengetahui seberapa penting perilaku individu dalam menerapkan *e-Government* yang berintegritas dan dapat diterima secara menyeluruh baik kalangan masyarakat ataupun pemangku kepentingan. Tahap yang kedua yaitu *conducting* (melakukan review). Tahapan ini untuk mengetahui relevan tidaknya suatu artikel terdahulu untuk penelitian ini. Tahap ini juga melakukan seleksi data dan mengkaji data serta melakukan sintesis untuk mendapatkan literatur yang relevan (Thenata, 2021). Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder (semua data bersumber dari Internet).

Pencarian literatur pada penelitian ini menggunakan database seperti google scholar dan mendeley dengan kata kunci *good governance*, transparansi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), *e-budgeting*, *e-government* dan juga akuntansi sector public atau sector public. Hasil penelusuran tersebut memperoleh 159 artikel penelitian yang membahas tentang perilaku transparansi APBD dengan menggunakan sistem *E-budgeting*.

Tabel 1: Daftar kata kunci pencarian

No.	Kata Kunci	Database	
		<i>Google Scholar</i>	<i>Mendeley</i>
1	good governance	363.000	17.941
2	Transparansi	29.800	2.393
3	APBD	18.100	1.417
4	e-budgeting	1.250	723
5	e-government	39.600	15.958

Sumber: data diolah (2022)

Peneliti ini menyeleksi artikel dari database akademik dengan beberapa kriteria meliputi: Artikel penelitian asli (bukan merupakan review penelitian), Diterbitkan oleh jurnal/prosiding akuntansi, penelitian dilakukan dalam rentang waktu 5 tahun (2018-2022), dan mengkaji bentuk perilaku transparansi *e-government* dalam menggunakan APBD melalui *e-budgeting*. Dari seleksi artikel tersebut diperoleh 15 artikel yang digunakan sebagai rujukan literatur pada penelitian ini, sehingga riset ini bisa dijadikan dasar teoritis pada riset yang akan datang tentang perilaku yang mencerminkan transparansi pada *e-government* yang diimplementasikan melalui *e-budgeting*. Tahapan ketiga melakukan *reporting* (Laporan). Tahapan *reporting* melakukan analisis hasil ekstraksi data sehingga bisa menemukan informasi dan pengetahuan (Thenata, 2021). Penulis melakukan penelitian mendalam untuk terkait dengan informasi pada riset ini supaya dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada pembaca.

Hasil dan Pembahasan

Masyarakat mulai tidak percaya kepada pemerintah dikarenakan banyaknya penyelewengan yang terjadi dalam birokrasi. Tugas utama pemerintah adalah mengabdikan kepada masyarakat dan memastikan kebutuhan warga Negara terpenuhi. Jika masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintahan, lalu bagaimana tugas tersebut bisa dicapai. Dalam pengelolaan APBD, pemerintah memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas (Lazuardi & Sartika, 2020). Banyaknya fraud yang mulai terjadi dalam birokrasi diperlukan transparansi untuk mengurangi resiko

tersebut (Mitan et al., 2021).

Hubungan Perilaku Individu Pada Penerapan *E-Government* Untuk Mencapai *Good Governance*

Perilaku individu merupakan deskripsi dari kepribadian yang dalam implementasinya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan system yang berlaku (Hasan, 2020). Perkembangan teknologi informasi menjadikan pemerintah menghadirkan e-government sebagai wujud dari inovasi teknologi informasi era digitalisasi (Pérez-Morote et al., 2020). Efektivitas *e-government* ditentukan oleh kepercayaan warga pada pemerintah dan kesenjangan digital yang terkait dengan pendapatan dan pendidikan (Pérez-Morote et al., 2020). Tingkat kepercayaan masyarakat dipengaruhi oleh perilaku individu masing-masing. Pemerintah tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan kepercayaan itu. Meskipun perencanaan *e-government* dilakukan dengan baik, tetapi perilaku dari individu yang memiliki wewenang tidak menggambarkan keselarasan dengan e-government, tentunya masyarakat juga tidak akan percaya dan bisa saja mereka menolak perubahan tersebut.

Sebelum melakukan proyek *e-government*, pemerintah harus melihat bagaimana kesiapan dari Negara tersebut baik dari segi SDM, teknologi dan anggaran. Seperti penelitian yang dilakukan (Joshi & Islam, 2018) bahwasanya pada Negara berkembang terjadi kendala dalam penerapan *e-government* yang meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya teknologi dan sumber daya manusia. Terdapat 5 faktor penentu yaitu, proses yang terperinci, layanan yang disederhanakan, aksesibilitas yang gesit, penggunaan teknologi mutakhir, serta kepercayaan dan kesadaran (Joshi & Islam, 2018). Lima komponen ini bisa diimplementasikan berbagai Negara dalam menerapkan perubahan tatanan kelola pemerintah dengan peningkatan keberlanjutan pelayanan. Kepercayaan kepada pemerintah menjadi predictor utama dalam mengadopsi layanan e-government bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, menariknya kepercayaan di internet tidak menjadi tolok ukur seseorang menggunakan layanan *e-government*. Penelitian yang dilakukan (Mensah, 2019) menjelaskan jika harapan kinerja, harapan usaha, dan kepercayaan di internet bukanlah penentu signifikan dari niat untuk menggunakan layanan e-government terutama bagi kalangan mahasiswa.

Penerapan *e-government* diharapkan pemerintah Indonesia dapat memperbaiki tata kelola dalam birokrasi menuju *good governance*. Beragamnya suku, budaya dan ras di Indonesia menjadikan *e-government* tidak bisa disamaratakan penggunaannya. Penelitian yang dilakukan (Majid, 2021) menghasilkan bahwa “Penerapan *good governance* dengan menggunakan *e-government* dari setiap daerah berbeda-beda sehingga memerlukan kajian yang kuat dalam implementasi nya, pengawasan dan evaluasi pemerintah di setiap periode. *E-government* perlu diperbarui dari setiap periode pemerintahan yang bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat”. Adanya perbedaan budaya mengakibatkan perilaku yang berbedabagi individu. Seperti contoh penerapan e-government DKI Jakarta jauh lebih baik dibandingkan di Bengkulu (Putra et al., 2018). Penelitian yang dilakukan (Cheisviyanny et al., 2018) menghasilkan “kualitas website yang sesuai dengan prinsip *good governance* di kota-kota di Sumatera Barat masih tergolong rendah”. Hal tersebut menyebabkan ketidakmampuan pengguna di Sumatera Barat (pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan investor).

E-Budgeting Sebagai Bentuk Transparansi APBD

E-budgeting merupakan salah satu komponen dari *e-government* yang lebih berorientasi pada perencanaan anggaran (Basir & Alwi, 2018). Sistem pemerintahan lama menggunakan pencatatan manual dalam melakukan perencanaan anggaran dan hanya bisa diakses oleh orang yang memiliki wewenang. Sedangkan, system *e-budgeting* lebih terbuka untuk umum karena berbasis digital dan dapat diakses dimana saja. Sebelum pelaksanaan

e-budgeting pada pemerintah kota Batu terjadi banyak kesalahan dalam pemasukan anggaran secara manual dan setelah implementasi *e-budgeting* mengalami perubahan dan kemajuan (Andhayani, 2020). Dalam mengelola APBD diperlukan kehati-hatian, jika lengah satu titik bisa berakibat pada perekonomian daerah. Yang memungkinkan keteringgalan pembangunan daerah dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang lebih efisien dalam mengelola APBD.

Dalam merencanakan perubahan sistem perencanaan anggaran, diperlukan mengkaji terlebih dahulu lingkungan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan setiap daerah berbeda-beda dan tidak bisa disamakan target penerapan e-budgeting. Jika terlalu memaksakan kehendak tanpa memperhatikan aspek-aspek penentu keberhasilan, dikhawatirkan akan terjadi masalah yang mungkin lebih serius daripada penggunaan sistem lama. Yang awalnya ingin tercipta efisiensi jika belum mampu malah berakibat sebaliknya. Hasil penelitian dari (Juliar & Dahtiah, 2020) menemukan penerapan sistem *e-budgeting* di Kota Bandung dapat menciptakan transparansi APBD. Selaras dengan penelitian yang dilakukan (Setyawan et al., 2018) bahwa “penyusunan *e-budgeting* pada APBD kabupaten Magelang telah membantu efisiensi dengan membuat kegiatan anggaran mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengendalian anggaran dengan cepat”. Keberhasilan dari penerapan *e-budgeting* di beberapa daerah tidak luput dari *controlling* dan SDM yang mencukupi.

Saat pengeluaran dan pemasukan daerah transparan ke public, kecil kemungkinan terjadinya fraud pada APBD. Penerapan e-budgeting dapat mengakibatkan seluruh masyarakat mengetahui berapa APBD di daerah tersebut dan apakah digunakan semestinya ataupun tidak. Transparansi menjadikan masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan daerah dan mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam membelanjakan APBD. Saat masyarakat mulai tidak peduli dengan perencanaan anggaran Daerah, maka besar kemungkinan banyak daerah yang akan tertinggal pembangunannya akibat ketidakikutsertaan masyarakat dalam mengawasi APBD yang sejatinya bukanlah milik pemegang wewenang melainkan milik Daerah.

Simpulan

Teknologi informasi terus berkembang hingga menjadi era digitalisasi. Pemerintah mulai mengikuti perkembangan teknologi informasi tersebut dengan mengganti sistem manual menjadi sistem digital untuk memberikan informasi pelayanan public. *E-government* hadir untuk memberikan informasi akurat dan seefisien mungkin untuk mencapai pemerintahan yang *good governance*. *E-government* menyediakan mulai dari pendidikan, pembayaran pajak, kesehatan, serta pendapatan belanja Negara/Daerah dan beberapa layanan lainnya. Pada perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah menggunakan *e-budgeting* untuk memudahkan masyarakat dapat mengakses informasi tersebut. Sehingga, masyarakat ikut andil dalam pengawasan pembangunan Daerahnya masing-masing. *E-Budgeting* mengintegrasikan sistem yang berbasis web dari segala bentuk perencanaan pendapatan dan belanja untuk daerah yang nantinya dapat tercipta asas *good governance* seperti akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi. Dalam pengimplementasian *e-budgeting*, diperlukan kesiapan daerah masing-masing. Tidak semua daerah siap menerima perubahan yang mendadak. Diperlukan perencanaan yang matang sebelum menerapkan *e-budgeting*. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas SDM baik dari masyarakat daerah maupun pemegang kepentingan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pengetahuan tentang daerah mana saja yang sudah menerapkan e-budgeting dan bagaimana hasil dari implementasi tersebut. dikarenakan penelitian menggunakan tinjauan literatur review yang mana hanya mengkaji

artikel yang sudah ada tanpa melakukan penelitian langsung ke daerah di Indonesia. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, supaya bisa mengkaji di daerah yang kategori pertumbuhan pembangunannya masih tertinggal. Supaya dapat ditarik kesimpulan bagaimana penerapan e-budgeting dari seluruh daerah di Indonesia baik yang pembangunannya lambat maupun cepat.

Daftar Pustaka

- A'yun, L. Q., & Hartaman, N. (2021). Evaluation of E-Budgeting Implementation in Planning Budget in Maros Regency. *Journal of Government and Political Issues*, 1(2). <https://doi.org/10.53341/jgpi.v1i2.22>
- Adila, R. N., & Dahtiah, N. (2020). Evaluasi Penerapan Sistem E-Budgeting dengan Pendekatan Human Organization Technology Fit Model pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Industrial Research Workshop and National Seminar, 2015*.
- Andhayani, A. (2020). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: E-Budgeting untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2). <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.005>
- Andriyani, K., Yuliar, A., & Raqib, M. (2021). Promosi Produk Di Era Digitalisasi Terhadap Minat Masyarakat Berumrah Pada Biro Hajar Aswad Mubaroq Surakarta. *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 12(1). <https://doi.org/10.24235/orasi.v12i1.7924>
- Andriyanto, D., Baridwan, Z., & Subekti, I. (2019). Antecedent Perilaku Penggunaan E-Budgeting: Kasus Sistem Informasi Keuangan Desa di Banyuwangi, Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2). <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i2.13938>
- Basir, A., & Alwi, A. (2018). Inovasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Saluran Komunikasi E-Budgeting Di Provinsi Sulawesi Selatan). *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Lingkup Akuntansi Sektor Publik.
- Cahyono, E. A., Sutomo, & Harsono, A. (2019). Literatur Review: Panduan Penulisan dan Penyusunan. *Jurnal Keperawatan*.
- Cheisviyanny, C., Helmy, H., & Dwita, S. (2018). Analisis Kualitas Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 6(3).
- CNN Indonesia. (2021). *Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102 dari 180* Baca artikel CNN Indonesia "Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102 dari 180."
- Efriza, & Supena, T. R. (2021). Proses Politik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Dki Jakarta Tahun 2015. *Jurnal Adhikari*, 1(1). <https://doi.org/10.53968/ja.v1i1.22>
- Fernández-Robin, C., Celemín-Pedroche, M. S., Santander-Astorga, P., & Alonso-Almeida, M. del M. (2019). Green practices in hospitality: A Contingency approach. *Sustainability (Switzerland)*, 11(13). <https://doi.org/10.3390/su11133737>
- Gamayuni, R. R., & Hendrawaty, E. (2020). E-Planning, E-Budgeting and the Quality of Government Institution Performance Accountability System in Indonesia. *Talent Development & Excellence*, 12(1s).
- Habibie, D. K. (2019). Citizen-Centric E-Governmentpelayanan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1). <https://doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.1-8>
- Hakim, A., Saputra, O. A., & Saleh, C. (2021). Policy determination in E-budgeting implementation by the government of DKI Jakarta - Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.19>

- Hanamunika, G., Sari, D. S., & Dai, R. M. (2021). Implementasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. *Responsive*, 3(3). <https://doi.org/10.24198/responsive.v3i3.31921>
- Harsanto, M. (2020). Biaya Promosi, Biaya Pendidikan Pelatihan, Dan Rencana Strategis Pemerintah Terhadap Market Share Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan*, 1(2). <https://doi.org/10.51805/jmbk.v1i2.11>
- Hasan, E. (2020). Perilaku Komunikasi Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Meningkatkan Profesionalitas Kerja Sebagai Abdi Negara Dan Abdi Masyarakat. *Jurnal Tatapamong*. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1140>
- Joshi, P. R., & Islam, S. (2018). E-government maturity model for sustainable E-government services from the perspective of developing countries. *Sustainability (Switzerland)*, 10(6). <https://doi.org/10.3390/su10061882>
- Juliar, R., & Dahtiah, N. (2020). Implementasi Kebijakan dan Sistem Pengendalian Manajemen E-Budgeting dalam mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1).
- Kholis, A., Husrizalsyah, D., & Wati, R. I. (2021). Model Respon Emergensi Bencana Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Akuntan Pendidik Dalam Pandemi Covid-19 Di Provinsi Sumatera Utara. *JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 9(2). <https://doi.org/10.24114/jakpi.v9i2.29504>
- Khotimah, N., & Astuti, R. S. (2020). Penerapan Sistem E-Budgeting Sebagai Bentuk Pemanfaatan Teknologi pada Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Simposium Nasional*.
- Kusumawati, M. P. (2019). Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik. *Jurnal Yuridis*, 6(1). <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i1.794>
- Lazuardi, M., & Sartika, N. (2020). ... Asas Transparansi dan Akuntabel dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di Desa Bantan Sari dan Desa Deluk Kecamatan Bantan *Seminar Nasional Industri Dan Teknologi*.
- Luthans, F., & Stewart, T. I. (1978). The Reality or Illusion of a General Contingency Theory of Management: A Response to the Longenecker and Pringle Critique. *Academy of Management Review*, 3(3). <https://doi.org/10.5465/amr.1978.4306049>
- Majid, J. (2021). Kontribusi Teori Contingency : Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui E-Government Di Indonesia. *Assets : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2). <https://doi.org/10.24252/assets.v11i2.23810>
- Maulana, A., Aryaputri, H., & Rosyari, F. R. (2020). Application Of E-Government System As An Effort To Create A Conducive Investment Climate In Banyuwangi Regency. *NATAPRAJA*, 8(2). <https://doi.org/10.21831/jnp.v8i2.34023>
- Mensah, I. K. (2019). Factors Influencing the Intention of University Students to Adopt and Use E-Government Services: An Empirical Evidence in China. *SAGE Open*, 9(2). <https://doi.org/10.1177/2158244019855823>
- Mitan, W., Dilliana, S. M., & Meyer, R. T. (2021). Pengaruh Fraud Diamond Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan pada Koperasi Kredit Sube Huter. *Jurnal Ilmiah Wahana ...*
- Nugraha, A. Y., & Wibowo, U. B. (2020). Manajemen sistem informasi e-budgeting pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 8(1). <https://doi.org/10.21831/jamp.v8i1.30596>
- Nugroho, K. S., Istiadi, I., & Marisa, F. (2020). Optimasi naive Bayes classifier untuk klasifikasi teks pada e-government menggunakan particle swarm optimization. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Komputer*, 8(1).
- Nuraeni, R., & Suryana, A. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Evaluasi

- Anggaran. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(1).
- Nurwanda, A., & Badriah, E. (2020). Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (Pid) Di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7.
- Pérez-Morote, R., Pontones-Rosa, C., & Núñez-Chicharro, M. (2020). The effects of e-government evaluation, trust and the digital divide in the levels of e-government use in European countries. *Technological Forecasting and Social Change*, 154. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.119973>
- Prayoga, F. M., & Yuhertiana, I. (2021). Studi Literatur Faktor yang Mempengaruhi Implementasi E-Budgeting dalam Sektor Publik. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 5(2). <https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n2.p68-79>
- Putra, R., Ardhiarisca, O., Wijayanti, R. R., & Pratiwi, B. Y. (2018). Evaluasi Perkembangan dan Transparansi Laporan Keuangan E-government Pemerintah Daerah di Indonesia. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi 2018 (SENTIKA 2018)*, 2018(Sentika).
- Rachmania, S. N. (2020). Kesalahan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Yang Berimplikasi Tindak Pidana. *Jurist-Diction*, 3(3). <https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18641>
- Rahman, A. T., Ianto, G., & Rosidi, R. (2019). Evaluation of E-Budgeting Implementation in Provincial Government of DKI Jakarta Using CIPP Model Approach. *Journal of Accounting and Investment*, 20(1). <https://doi.org/10.18196/jai.2001110>
- Santis, S., Grossi, G., & Bisogno, M. (2018). Public sector consolidated financial statements: a structured literature review. In *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* (Vol. 30, Issue 2). <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2018-0017>
- Setiawan, D. (2018). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1). <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1474>
- Setyawan, S., Priyono, N., & Iswanaji, C. (2018). Development Model of E-Budgeting and E-Reporting System on the Management of Village Fund Finance. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(1). <https://doi.org/10.15294/jda.v9i1.12000>
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 93–101. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2527>
- Thenata, A. P. (2021). Text Mining Literature Review on Indonesian Social Media. *Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, 7(2). <https://doi.org/10.26418/jp.v7i2.47975>
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136–155. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>
- Triyono, N., Kalangi, L., Alexander, S., Konsistensi, E., Dan, P., Triyono, N., Kalangi, L., & Alexander, S. (2019). Evaluasi Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Wahyuningsih, D., & Purnomo, E. P. (2020). Studi Komparasi: Penerapan E-Government di Korea Selatan dan Indonesia. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(2). <https://doi.org/10.33506/jn.v5i2.822>
- Wance, M. (2019). Dinamika Perencanaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buru Selatan. *The Indonesian Journal of Public Administration*

- (IJPA), 5(1). <https://doi.org/10.52447/ijpa.v5i1.1648>
- Zahri, R. M., & Kusumastuti, D. A. (2020). Determinan Persepsi Pengguna, Kepuasan Pengguna dan Kesuksesan Implementasi E-Budgeting di Pemerintah Kota Surakarta. *Owner*, 4(1). <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.221>
- Zaliluddin, D., Budiman, B., & Rully, A. (2020). Implementasi E-Government Berbasis Android. *JSiI (Jurnal Sistem Informasi)*, 7(2). <https://doi.org/10.30656/jsii.v7i2.2052>
- Zhu, M., Sari, A., & Lee, M. M. (2018). A systematic review of research methods and topics of the empirical MOOC literature (2014–2016). *Internet and Higher Education*, 37. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2018.01.002>